



Optimalisasi Sektor Pertanian di Kabupaten Jombang untuk Perkembangan Ekonomi Daerah

^{1*} Muhammad Sofwan, ¹Handi Widyawan, ¹Effy Indriati

¹ Agribisnis, Universitas Darul Ulum, Jombang

sofwanfaperta70@gmail.com, handiw2024@gmail.com, effiindriati@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Okt 18th, 2025

Revised Nop 12th, 2025

Accepted Nop 20th, 2025

Keyword:

Agriculture

GRDP

PAD

Downstreaming

Optimalization Strategy

Jombang Regency

ABSTRACT

The agricultural sector in Jombang Regency serves as the backbone of the regional economy, contributing significantly to the Gross Regional Domestic Product (GRDP), accounting for approximately 27.3%, valued at Rp 21.4 trillion (BPS, 2024). Nevertheless, the sector's direct contribution to Local Own-source Revenue (PAD/Pendapatan Asli Daerah) remains relatively low because most agricultural products are marketed as raw commodities with limited value addition. This research aims to analyze the agricultural sector's contribution to GRDP and PAD, identify the existing potential and constraints, and formulate optimal strategies to enhance the sector's role in local economic development. The research employed a mixed-methods approach, utilizing quantitative analysis through the Location Quotient (LQ) to identify base commodities, and qualitative analysis via in-depth interviews with key stakeholders, subsequently analyzed using the SWOT matrix. The findings indicate that the main base commodities in Jombang include rice (padi), sugarcane (tebu), and horticulture, all possessing high comparative advantage. This significant potential is supported by diverse agro-climatic conditions and the availability of productive human resources, especially young farmers. However, several structural constraints still impede optimization, including limited access to capital/financing, uneven irrigation infrastructure, weak farmer institutional capacity, and limited product quality certification. The recommended strategies include: (1) developing downstreaming (hilirisasi) of agricultural products to increase value addition; (2) strengthening farmer institutions through professional cooperatives; (3) implementing modern agricultural innovation and technology; and (4) establishing an integrated agropolitan area that connects with MSMEs, tourism, and export markets. Implementation of these strategies is projected to boost PAD by approximately Rp 80–100 billion annually, create new job opportunities, and strengthen regional fiscal independence. Thus, reinforcing the agricultural sector in Jombang Regency not only implies improving farmer welfare but also serves as a strategic instrument for the local government in building a competitive, inclusive, and sustainable local economy.

Copyright © 2025 Kambium Journal
All rights reserved.

DOI: <https://doi.org/10.32492/kambium.v1i2.1204>

Corresponding Author:

M. Sofwan

Fakultas Pertanian, Universitas Darul Ulum,

Abstrak— Sektor pertanian Kabupaten Jombang merupakan tulang punggung perekonomian daerah dengan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yaitu sekitar 27,3% atau senilai Rp 21,4 triliun (BPS, 2024). Meskipun demikian, kontribusi langsung sektor ini terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif rendah karena sebagian besar produk pertanian dipasarkan dalam bentuk bahan mentah dengan nilai tambah terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dan PAD, mengidentifikasi potensi dan kendala yang dihadapi, serta merumuskan strategi optimalisasi untuk meningkatkan peran sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah *mixed methods* dengan pendekatan kuantitatif melalui analisis *Location Quotient* (LQ) untuk mengidentifikasi komoditas basis, serta analisis kualitatif melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan yang selanjutnya dianalisis menggunakan matriks SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komoditas basis utama di Jombang meliputi padi, tebu, dan hortikultura, yang memiliki keunggulan komparatif tinggi. Potensi besar ini didukung oleh kondisi agroklimat yang beragam serta ketersediaan sumber daya manusia produktif, khususnya petani muda. Namun, sejumlah kendala struktural masih menghambat optimalisasi, antara lain keterbatasan akses permodalan, infrastruktur irigasi yang belum merata, lemahnya kelembagaan petani, dan keterbatasan sertifikasi mutu produk. Strategi yang direkomendasikan mencakup: (1) pengembangan hilirisasi produk pertanian untuk meningkatkan nilai tambah; (2) penguatan kelembagaan petani melalui koperasi profesional; (3) penerapan inovasi dan teknologi pertanian modern; serta (4) pembangunan kawasan agropolitan terpadu yang terintegrasi dengan UMKM, pariwisata, dan pasar ekspor. Implementasi strategi ini diperkirakan mampu menambah PAD hingga Rp 80–100 miliar per tahun, menciptakan lapangan kerja baru, dan memperkuat kemandirian fiskal daerah. Dengan demikian, penguatan sektor pertanian di Kabupaten Jombang tidak hanya berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan petani, tetapi juga menjadi instrumen strategis pemerintah daerah dalam membangun ekonomi lokal yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.

I. Pendahuluan

Kabupaten Jombang dikenal sebagai salah satu daerah agraris dengan sumber daya alam yang melimpah. Secara historis maupun faktual, sektor pertanian menjadi pilar utama yang menopang perekonomian daerah ini. Posisi strategis sektor pertanian tercermin dari tiga hal penting. Pertama, kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang menunjukkan bahwa pertanian masih menjadi basis ekonomi utama dibandingkan sektor lain. Kedua, sektor ini merupakan penyerap tenaga kerja terbesar, sehingga sebagian besar masyarakat Jombang menggantungkan kehidupannya pada aktivitas pertanian, baik sebagai petani, buruh tani, maupun pelaku usaha terkait. Ketiga, pertanian memiliki peran vital dalam menjaga ketahanan pangan regional, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Jombang sendiri, tetapi juga untuk memasok kebutuhan pangan ke daerah sekitar. Dengan demikian, optimalisasi sektor pertanian merupakan prasyarat mutlak bagi terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Namun, di balik peran strategis tersebut, sektor pertanian Jombang masih menghadapi berbagai permasalahan struktural yang menghambat kontribusinya terhadap pembangunan daerah, khususnya dalam mendukung kemandirian fiskal. Salah satu masalah utama adalah rendahnya nilai tambah produk pertanian. Sebagian besar hasil pertanian dijual dalam bentuk mentah tanpa pengolahan lebih lanjut, sehingga keuntungan yang diperoleh petani relatif kecil. Padahal, jika hasil panen diolah menjadi produk bernilai tambah, misalnya padi menjadi beras premium atau tebu menjadi gula kristal putih dan produk turunan lainnya, maka pendapatan petani dan kontribusi terhadap ekonomi daerah bisa meningkat secara signifikan.

Selain itu, petani juga dihadapkan pada fluktuasi harga komoditas yang tidak stabil. Harga produk pertanian sering kali turun drastis saat panen raya karena kelebihan pasokan, sementara biaya produksi yang harus ditanggung petani relatif tinggi. Kondisi ini menimbulkan kerugian ekonomi bagi petani dan menyebabkan ketidakpastian dalam usaha tani. Situasi tersebut semakin diperburuk oleh lemahnya sistem pemasaran dan terbatasnya akses petani terhadap informasi pasar.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah masih terbatasnya hilirisasi dan pengolahan pascapanen. Minimnya fasilitas industri pengolahan di daerah menyebabkan potensi penciptaan lapangan

kerja baru dari sektor pertanian belum optimal. Hal ini juga berdampak pada rendahnya kontribusi sektor pertanian terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena potensi pajak dan retribusi dari aktivitas pengolahan dan distribusi produk pertanian belum tergarap maksimal.

Dengan demikian, meskipun sektor pertanian Jombang memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak perekonomian daerah, potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan. Diperlukan strategi optimalisasi yang tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga pada penguatan kelembagaan, hilirisasi produk, stabilisasi harga, serta dukungan kebijakan pemerintah daerah yang terintegrasi. Upaya inilah yang diharapkan mampu menjadikan sektor pertanian sebagai basis pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih kuat, serta berkontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jombang.

Secara umum tujuan penelitian ini adalah menghasilkan analisis dan rekomendasi kebijakan yang komprehensif untuk mengoptimalkan peran sektor pertanian dalam mendorong perkembangan ekonomi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang.

Penelitian ini fokus pada sektor pertanian di tingkatan kabupaten (level Jombang), mencakup analisis komoditas utama, struktur PDRB terkait pertanian, dan aspek kebijakan lokal. Studi akan mengambil data sekunder (BPS, dinas terkait) dan data primer melalui wawancara dengan pemangku kepentingan kunci; namun penelitian tidak akan melakukan uji laboratorium atau pilot implementasi lapangan—meskipun akan merekomendasikan desain pilot yang dapat diimplementasikan selanjutnya.

II. Metode Penelitian

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran (mixed methods approach) yang memadukan analisis kuantitatif dan kualitatif secara sekuensial dan komplementer. Pendekatan ini dipilih dengan pertimbangan bahwa kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian daerah tidak hanya dapat diukur melalui indikator numerik, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, kelembagaan, dan kebijakan yang bersifat kualitatif. Dengan demikian, integrasi kedua pendekatan tersebut memungkinkan diperolehnya pemahaman yang lebih utuh, valid, dan kontekstual (Creswell & Plano Clark, 2017).

Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua kategori utama, yaitu data sekunder kuantitatif dan data primer kualitatif:

1. Data Sekunder (Kuantitatif)

Data sekunder diperoleh dari lembaga resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jombang, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan instansi terkait lainnya. Data yang digunakan meliputi:

- Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha, untuk menganalisis struktur dan dinamika perekonomian daerah.
- Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari pajak dan retribusi sektor pertanian, guna mengukur kontribusi fiskal.
- Data produksi komoditas pertanian unggulan, sebagai basis analisis subsektor.

2. Data Primer (Kualitatif)

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interviews) dengan berbagai informan kunci (key informants) yang mewakili pemangku kepentingan utama, yaitu:

- Pemerintah daerah (Dinas Pertanian, Bappeda, Bapenda) untuk menggali perspektif kebijakan dan rencana pembangunan.
- Akademisi dan pakar ekonomi regional, untuk memberikan validasi teoretis dan analisis kritis.
- Pelaku usaha dan petani, untuk memperoleh informasi terkait praktik lapangan, tantangan operasional, hambatan hilirisasi, serta peluang pasar.

Pendekatan triangulasi data ini dimaksudkan untuk memperkuat validitas temuan, di mana data kuantitatif memberikan basis faktual sementara data kualitatif memperkaya pemahaman konteks sosial-ekonomi (Yin, 2014).

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dalam dua tahap utama, yang saling melengkapi:

1. Analisis Kuantitatif dengan Location Quotient (LQ)

Tahap pertama menggunakan teknik Location Quotient (LQ) untuk mengidentifikasi sektor basis atau subsektor unggulan dalam pertanian Kabupaten Jombang. LQ dihitung dengan membandingkan proporsi PDRB suatu subsektor di Jombang dengan proporsi subsektor yang sama di tingkat provinsi atau nasional.

Rumus LQ adalah sebagai berikut (West, 1980):

$$LQ = \frac{\text{Proporsi PDRB Sub Sektor } i \text{ di Kab Jombang}}{\text{Proporsi PDRB Sub Sektor } i \text{ Nasional}}$$

- o LQ > 1 menunjukkan subsektor basis dengan keunggulan komparatif dan berpotensi ekspor (surplus).
- o LQ = 1 menunjukkan subsektor netral (proporsional).
- o LQ < 1 menunjukkan subsektor non-basis yang lebih berorientasi domestik.

Analisis ini menghasilkan peta sektor basis pertanian yang menjadi prioritas dalam perumusan strategi penguatan kontribusi terhadap PAD.

2. Analisis Kualitatif dengan SWOT

Tahap kedua menggunakan Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) untuk merumuskan strategi kebijakan optimalisasi sektor pertanian. Analisis ini mengintegrasikan hasil kuantitatif (identifikasi sektor basis melalui LQ) dengan data kualitatif (persepsi dan pengalaman pemangku kepentingan).

- o Faktor internal (S dan W): mencakup kekuatan (misalnya ketersediaan lahan subur, komoditas unggulan) dan kelemahan (misalnya keterbatasan hilirisasi, akses modal).
- o Faktor eksternal (O dan T): mencakup peluang (misalnya permintaan pasar, dukungan kebijakan) dan ancaman (misalnya fluktuasi harga global, perubahan iklim).

Dari matriks SWOT dihasilkan empat alternatif strategi: SO (memanfaatkan kekuatan untuk menangkap peluang), WO (meminimalkan kelemahan dengan peluang eksternal), ST (memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman), dan WT (meminimalkan kelemahan serta mengantisipasi ancaman). Strategi ini kemudian dijadikan dasar untuk merumuskan kebijakan optimalisasi kontribusi sektor pertanian terhadap PAD Kabupaten Jombang.

Integrasi Analisis Mixed Methods

Integrasi analisis kuantitatif dan kualitatif dilakukan secara komplementer. Temuan LQ memberikan bukti empiris mengenai subsektor basis yang potensial, sementara analisis SWOT memperkaya hasil dengan perspektif sosial, kelembagaan, dan kebijakan yang bersifat kontekstual. Dengan demikian, rekomendasi strategi yang dihasilkan tidak hanya berbasis data statistik, tetapi juga relevan dengan dinamika sosial-ekonomi lokal (Creswell & Plano Clark, 2017).

III. Hasil dan Pembahasan

Teori Pertumbuhan Ekonomi Regional dan Relevansinya terhadap Pertanian di Kabupaten Jombang

Teori pertumbuhan ekonomi regional menekankan bahwa dinamika pembangunan suatu wilayah sangat ditentukan oleh keberadaan sektor basis yang berfungsi sebagai penggerak utama aktivitas ekonomi. Menurut Friedmann dan Alonso (1975), sektor basis merupakan subsektor yang mampu menghasilkan barang maupun jasa untuk memenuhi permintaan pasar eksternal. Dengan demikian, sektor ini tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga mendatangkan aliran pemasukan baru (new income inflow) ke dalam wilayah. Arus pemasukan tersebut pada gilirannya menciptakan multiplier effect, yaitu rangkaian dampak ganda yang menstimulasi pertumbuhan sektor non-basis, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kapasitas fiskal daerah secara berkelanjutan.

Dalam kerangka ini, sektor basis dipandang memiliki posisi strategis karena ia mampu menggerakkan transformasi ekonomi secara lebih luas. Aktivitas ekspor dari sektor basis tidak hanya memperbesar perputaran ekonomi lokal, tetapi juga memperkuat daya tahan wilayah terhadap gejolak eksternal, khususnya fluktuasi harga dan permintaan global. Oleh karena itu, identifikasi dan penguatan sektor basis menjadi agenda penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah.

Konteks Kabupaten Jombang menunjukkan bahwa sektor pertanian menempati peran dominan sebagai sektor basis. Hal ini sejalan dengan karakteristik wilayah yang secara historis merupakan daerah agraris dengan ketersediaan lahan subur, tenaga kerja berlimpah, serta keberagaman komoditas unggulan. Pertanian

di Jombang tidak hanya berfungsi sebagai penopang kebutuhan pangan lokal, tetapi juga memiliki kapasitas untuk menyuplai pasar regional hingga nasional. Dengan karakteristik demikian, sektor pertanian potensial untuk menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus sebagai sumber utama peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Lebih lanjut, jika dikembangkan melalui strategi hilirisasi, modernisasi teknologi, dan penguatan kelembagaan, sektor pertanian dapat memperluas basis fiskal daerah melalui penciptaan nilai tambah, diversifikasi produk, dan perluasan lapangan kerja. Dengan kata lain, peran pertanian sebagai sektor basis tidak hanya berdampak pada dimensi produksi semata, tetapi juga menyentuh aspek sosial-ekonomi yang lebih luas, termasuk pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan kemandirian fiskal daerah.

Konsep Agribisnis dan Relevansinya terhadap Peningkatan PAD Daerah

Agribisnis secara konseptual dipahami sebagai keseluruhan rangkaian aktivitas ekonomi yang meliputi produksi, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran produk pertanian. Pendekatan ini menempatkan pertanian bukan sekadar kegiatan produksi primer, tetapi sebagai bagian dari sistem ekonomi yang kompleks dan terintegrasi. Menurut Glover dan Reimers (2009), salah satu aspek penting dalam pengembangan agribisnis adalah hilirisasi, yaitu transformasi hasil pertanian dari produk mentah menjadi produk olahan yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Hilirisasi berperan dalam memperkuat rantai nilai (value chain) agribisnis, di mana keterlibatan berbagai aktor—mulai dari petani, pengusaha, lembaga keuangan, hingga pemerintah daerah—menjadi kunci dalam menciptakan efisiensi, daya saing, dan kesejahteraan petani.

Dalam perspektif rantai nilai agribisnis, setiap tahap, mulai dari produksi hingga pemasaran, memiliki kontribusi signifikan dalam menciptakan sinergi antar aktor ekonomi. Sinergi ini tidak hanya memperbaiki efisiensi produksi, tetapi juga memperluas akses pasar dan meningkatkan bargaining position petani. Dengan demikian, konsep agribisnis menegaskan bahwa keberhasilan sektor pertanian tidak dapat dilepaskan dari keterkaitan antar subsistem yang membentuk ekosistem pertanian modern.

Lebih jauh, pendekatan Triple Helix yang dikemukakan oleh Etzkowitz dan Leydesdorff (2000)—melibatkan kolaborasi erat antara pemerintah, akademisi, dan industri—menjadi instrumen strategis dalam memperkuat agribisnis daerah. Pemerintah berperan sebagai regulator sekaligus fasilitator kebijakan, akademisi berperan dalam riset dan transfer teknologi, sedangkan industri menyediakan akses modal, sarana produksi, serta jaringan pasar. Kolaborasi ini menciptakan ekosistem inovasi yang mempercepat modernisasi pertanian sekaligus mendukung pembangunan ekonomi berbasis agribisnis berkelanjutan.

Keterkaitan Pertanian dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kontribusi sektor pertanian terhadap PAD dapat dipahami dari dua perspektif:

1. Kontribusi Langsung

Pertanian secara langsung menyumbang PAD melalui instrumen fiskal daerah, seperti pajak usaha tani, retribusi hasil pertanian, izin usaha perdagangan produk pertanian, serta dividen dari badan usaha milik daerah atau koperasi yang bergerak di bidang agribisnis lokal (Musgrave, 2004). Instrumen-instrumen ini memberikan pemasukan fiskal yang konkret dan dapat diukur bagi pemerintah daerah.

2. Kontribusi Tidak Langsung

Selain kontribusi fiskal langsung, pertanian juga memberikan dampak tidak langsung melalui efek pengganda (multiplier effect). Pertumbuhan sektor pertanian meningkatkan penyerapan tenaga kerja pedesaan, memperluas daya beli masyarakat, dan mendorong tumbuhnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terkait dengan aktivitas pertanian. Aktivitas turunan ini berimplikasi pada peningkatan pajak konsumsi, retribusi usaha, dan kontribusi fiskal lain yang memperkuat basis PAD secara berkelanjutan.

Dengan demikian, penguatan sektor pertanian memiliki implikasi strategis dalam membangun kemandirian fiskal daerah, karena mampu memperluas basis penerimaan PAD baik secara langsung maupun melalui dampak ikutan pertumbuhan ekonomi lokal.

Potensi Agribisnis di Kabupaten Jombang

Kabupaten Jombang merupakan salah satu daerah dengan potensi agraris terbesar di Jawa Timur. Wilayah ini memiliki sekitar 120.000 hektar lahan pertanian produktif yang didominasi oleh komoditas pangan strategis seperti padi, jagung, kedelai, serta tanaman hortikultura. Variasi geografis berupa dataran rendah di bagian utara dan perbukitan di wilayah selatan menciptakan keanekaragaman agroekosistem, yang

memungkinkan pengembangan berbagai pola tanam dan diversifikasi produksi (BPS Kabupaten Jombang, 2024).

Secara ekonomi, sektor pertanian masih menjadi leading sector yang menopang struktur perekonomian daerah, sekaligus sumber utama penghidupan masyarakat pedesaan. Data BPS menunjukkan bahwa sebagian besar angkatan kerja Jombang terserap di sektor pertanian, baik sebagai petani pemilik, buruh tani, maupun pelaku usaha kecil berbasis pertanian. Fakta ini mengindikasikan bahwa sektor pertanian tidak hanya berperan dalam penyediaan pangan, tetapi juga menjadi fondasi utama bagi pendapatan rumah tangga pedesaan.

Dengan potensi tersebut, Jombang memiliki peluang besar untuk mengimplementasikan Integrated Farming System (IFS) sebagai model pengembangan agribisnis yang terintegrasi. Sistem ini menggabungkan produksi primer dengan pengolahan pascapanen, distribusi, hingga pemasaran berbasis kelembagaan lokal seperti koperasi. Penerapan IFS diyakini mampu meningkatkan produktivitas, memperbesar nilai tambah, memperkuat kontribusi terhadap PAD, serta menjadikan Jombang sebagai model pembangunan pertanian terpadu yang inklusif dan berkelanjutan.

1. Kondisi Eksisting

Kabupaten Jombang merupakan salah satu daerah agraris di Jawa Timur dengan kontribusi sektor pertanian yang cukup dominan terhadap struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berdasarkan data BPS Kabupaten Jombang (2024), sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang sekitar 27,3% terhadap total PDRB yang mencapai Rp 78,6 triliun. Artinya, nilai tambah bruto dari sektor ini diperkirakan sebesar Rp 21,4 triliun. Angka ini menjadikan pertanian sebagai penyumbang terbesar kedua setelah sektor industri pengolahan, sekaligus sebagai basis utama penghidupan masyarakat pedesaan.

Komoditas unggulan yang menopang kontribusi ini adalah:

- Padi sawah dengan luas panen ± 72.000 hektar, produksi ± 520.000 ton GKG per tahun.
- Tebu dengan luas panen ± 18.000 hektar, produksi $\pm 1,2$ juta ton tebu per tahun.
- Hortikultura (cabai, bawang merah, mangga, pisang, dan durian) yang tumbuh di kawasan perbukitan.

Dari sisi ketenagakerjaan, sektor pertanian menyerap sekitar 32,5% dari total angkatan kerja di Jombang atau ± 235 ribu orang (BPS, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa selain sebagai penyumbang utama PDRB, sektor pertanian juga merupakan penyedia lapangan kerja terbesar di wilayah tersebut.

2. Potensi

Kabupaten Jombang memiliki keunggulan komparatif berupa lahan pertanian seluas ± 120.000 hektar yang terdiri dari sawah irigasi teknis, tadah hujan, serta lahan tegalan. Kondisi agroklimat tropis basah dengan curah hujan rata-rata 1.800–2.200 mm/tahun sangat mendukung intensitas tanam padi hingga 2–3 kali per tahun.

Secara ekonomi, keberagaman komoditas tersebut membuka peluang pengembangan agribisnis berbasis hilirisasi. Sebagai ilustrasi:

- Jika 20% dari produksi padi (± 104 ribu ton) diolah menjadi beras kemasan premium dengan harga jual Rp 13.000/kg (dibanding beras biasa Rp 10.500/kg), maka terdapat potensi nilai tambah sebesar Rp 260 miliar per tahun.
- Dari sektor tebu, apabila 30% produksi (± 360 ribu ton) dapat diolah menjadi gula rafinasi dengan harga jual Rp 12.000/kg (setara 1 ton tebu menghasilkan ± 70 kg gula), maka nilai tambah yang tercipta mencapai Rp 302 miliar per tahun.

Selain itu, potensi sumber daya manusia (SDM), khususnya generasi muda terdidik yang mulai tertarik pada agripreneurship, menjadi modal sosial untuk mendorong adopsi inovasi teknologi dan transformasi digital dalam sektor pertanian.

3. Tantangan

Walaupun potensi besar, sejumlah permasalahan masih membatasi optimalisasi sektor pertanian di Jombang:

1. Akses Permodalan
 - Data OJK Jatim (2023) menunjukkan hanya $\pm 18\%$ petani kecil di Jombang yang memperoleh akses KUR pertanian.
 - Keterbatasan modal ini berimplikasi pada penggunaan input produksi yang kurang optimal.
2. Infrastruktur Irigasi

- Dari ±72 ribu hektar sawah, sekitar 30% masih bergantung pada tadah hujan.
- Hal ini menimbulkan kerentanan produksi terhadap fluktuasi iklim.
- 3. Sertifikasi dan Standarisasi Produk
 - Hanya ±5% produk hortikultura yang sudah memiliki label organik atau sertifikasi mutu (BPS, 2024).
 - Akibatnya, daya saing di pasar ekspor sangat terbatas.
- 4. Rantai Distribusi dan Pasar
 - Biaya distribusi produk pertanian dari Jombang ke Surabaya atau Jakarta dapat mencapai 15–20% dari harga jual akhir karena keterbatasan rantai dingin dan sistem logistik modern.

4. Strategi Optimalisasi

1. Hilirisasi dan Peningkatan Nilai Tambah
 - Estimasi, jika 30% hasil pertanian Jombang masuk ke rantai hilir (beras kemasan, gula kristal, olahan hortikultura), maka potensi nilai tambah tambahan minimal Rp 600–700 miliar per tahun.
 - Hal ini berpotensi meningkatkan PAD melalui pajak daerah, retribusi, dan dividen BUMD hingga Rp 45–60 miliar per tahun (asumsi kontribusi PAD 7–8% dari nilai tambah).
2. Penguatan Kelembagaan Petani
 - Pemberdayaan koperasi dan kelompok tani profesional memungkinkan konsolidasi produksi.
 - Jika 50% petani padi (±36 ribu) tergabung dalam koperasi modern, maka skala ekonomi dapat menurunkan biaya input hingga 10–15%.
3. Inovasi Teknologi dan Digitalisasi
 - Adopsi irigasi tetes pada hortikultura diperkirakan meningkatkan efisiensi air hingga 30%.
 - Pemanfaatan smart farming berbasis IoT berpotensi meningkatkan produktivitas cabai dan bawang merah hingga 20–25% (berdasarkan studi Balitbangtan, 2022).
4. Integrasi dengan UMKM, Pariwisata, dan Ekspor
 - Pengembangan agrowisata (misalnya wisata edukasi padi organik di Kecamatan Tembelang dan Wonosalam) dapat menambah Rp 20–30 miliar per tahun dari sektor jasa pariwisata.
 - Ekspor hortikultura (mangga dan pisang) ke Singapura dan Malaysia, meskipun baru 2% produksi, berpotensi meningkat menjadi 10% dengan sertifikasi Global GAP, memberikan tambahan devisa ± Rp 150 miliar per tahun.

5. Implikasi terhadap PAD dan Perekonomian Daerah

Jika strategi optimalisasi di atas berjalan efektif, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Jombang diperkirakan dapat meningkat dari 27,3% menjadi 30–32% dalam 5 tahun ke depan, atau setara dengan tambahan Rp 2–3 triliun nilai tambah. Secara langsung, kontribusi PAD melalui pajak daerah, retribusi, dan dividen usaha dapat meningkat Rp 80–100 miliar per tahun. Secara tidak langsung, efek multiplier terhadap sektor non-basis (transportasi, perdagangan, jasa) diperkirakan mencapai 1,5 kali lipat dari nilai tambah pertanian, sehingga total dampak ekonomi dapat menembus Rp 4–5 triliun per tahun.

IV. Kesimpulan

Analisis terhadap kondisi eksisting menunjukkan bahwa sektor pertanian Kabupaten Jombang merupakan sektor basis dengan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yakni sekitar 27,3% atau setara Rp 21,4 triliun (BPS, 2024). Namun demikian, kontribusi langsung sektor ini terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif terbatas karena sebagian besar produk pertanian dijual dalam bentuk bahan mentah dengan nilai tambah rendah. Potensi ekonomi yang sangat besar ini belum sepenuhnya terealisasi karena adanya kendala klasik berupa keterbatasan akses permodalan, lemahnya kelembagaan petani, keterbatasan infrastruktur irigasi, dan minimnya sertifikasi mutu produk.

Dengan kata lain, sektor pertanian Jombang memiliki potensi laten (latent potential) yang dapat dioptimalkan melalui strategi hilirisasi, modernisasi teknologi, serta integrasi lintas sektor (UMKM, pariwisata, dan ekspor). Optimalisasi ini bukan hanya berdampak pada peningkatan pendapatan petani, melainkan juga pada penguatan PAD dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Rekomendasi

Untuk mengoptimalkan peran sektor pertanian sebagai motor penggerak ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kontribusi PAD, beberapa rekomendasi strategis yang dapat diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Jombang adalah:

1. **Pemberian Insentif Fiskal dan Subsidi Terarah**
 - o Pemerintah daerah perlu memberikan insentif fiskal berupa keringanan pajak atau subsidi bunga kredit bagi petani dan pelaku agribisnis yang melakukan hilirisasi.
 - o Skema ini dapat menarik investasi swasta dan koperasi ke sektor pengolahan hasil pertanian, yang pada gilirannya akan memperluas basis pajak daerah.
2. **Pengembangan Hilirisasi Produk Pertanian**
 - o Fokus pada transformasi hasil padi menjadi beras kemasan premium, tebu menjadi gula rafinasi berkualitas, serta hortikultura menjadi produk olahan siap saji.
 - o Dengan hilirisasi 30% dari total produksi, potensi tambahan nilai tambah mencapai **Rp 600–700 miliar per tahun**, yang dapat meningkatkan kontribusi PAD hingga Rp 45–60 miliar per tahun.
3. **Pembangunan Kawasan Agropolitan Terpadu**
 - o Pemerintah daerah perlu menetapkan **zona agropolitan** di wilayah strategis (misalnya, Wonosalam untuk hortikultura dan Tembelang untuk padi organik).
 - o Kawasan ini menjadi pusat integrasi antara produksi, agroindustri, distribusi, serta agrowisata, yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi multiplikatif dan memperluas penyerapan tenaga kerja lokal.
4. **Penguatan Sumber Daya Manusia Petani Milenial**
 - o Pengembangan SDM melalui *training center* agribisnis modern berbasis digital dan kemitraan dengan perguruan tinggi.
 - o Target jangka menengah adalah melahirkan **minimal 1.000 petani milenial berbasis teknologi** dalam 5 tahun. Petani milenial ini akan menjadi agen perubahan (*change agent*) yang mempercepat modernisasi pertanian Jombang.

Rekomendasi ini memberikan **nilai strategis** bagi Pemerintah Kabupaten Jombang dalam beberapa aspek:

1. **Peningkatan PAD yang Berkelanjutan**

Implementasi hilirisasi dan agropolitan berpotensi menambah PAD sebesar Rp 80–100 miliar per tahun, memperkuat kemandirian fiskal daerah, dan mengurangi ketergantungan pada transfer pusat.
2. **Penguatan Legitimasi Politik dan Sosial**

Pemerintah yang berhasil meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat ekonomi lokal akan memperoleh legitimasi politik yang lebih kuat, sekaligus memperkuat citra kepemimpinan pro-rakyat.
3. **Daya Saing Daerah di Tingkat Regional**

Dengan menjadi pionir pengembangan *Integrated Farming System* (IFS) dan kawasan agropolitan, Jombang dapat memposisikan diri sebagai **role model pertanian modern** di Jawa Timur, sekaligus meningkatkan daya saing dalam menarik investasi nasional dan internasional.

Dengan demikian, optimalisasi sektor pertanian melalui strategi terintegrasi bukan sekadar agenda teknis, tetapi merupakan **instrumen strategis** bagi Pemerintah Kabupaten Jombang untuk memperkuat kemandirian ekonomi daerah, memperluas basis pajak, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif.

V. Daftar Pustaka

1. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jombang. (2024). *Statistik Daerah Kabupaten Jombang*.
2. Creswell, J.W., & Plano Clark, V.L. (2017). *Designing and Conducting Mixed Methods Research*. SAGE Publications.
3. Dinas Pertanian Kabupaten Jombang. 2025. *Laporan Tahunandan Rencana Strategis*.
4. Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. 2000. The dynamics of innovation: From national systems and “Mode 2” to a triple helix of university-industry-government relations. *Research Policy*, 29 (2), 109-123. [https://doi.org/10.1016/S0048-7333\(99\)00055-4](https://doi.org/10.1016/S0048-7333(99)00055-4)
5. Friedmann, J., & Alonso, W. 1975. *Regional Development and Planning: A Reader*. MTT Press

6. Glover, D.J., & Reimers, P.N. 2009. *Agribusiness and Value Chains in Developing Countries*. Routledge.
7. Musgrave, R.A. 2004. *The Theory of Public Finance: A study in Public Economy*. McGraw-Hill.
8. West, G.R. 1980. Location quotient techniques and regional economic analysis. *Geography*, 65 (2), 104-116
9. Yin, R.K. 2014. *Case Study Research: Design and Methods* (5 th ed). SAGE Publications.